

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, melainkan juga sebagai alat strategis untuk membentuk kepribadian dan karakter peserta didik sesuai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Menurut Wina Sanjaya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁹ Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan, karena di dalamnya terkandung arah, isi, dan cara pelaksanaan pembelajaran yang akan membentuk kompetensi peserta didik.

Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, bukan semata-mata berangkat dari materi ajar. Taba menekankan bahwa perencanaan kurikulum yang baik harus dimulai dari identifikasi kebutuhan yang nyata agar pembelajaran dapat bersifat kontekstual dan bermakna bagi peserta didik.²⁰

Pandangan lain dikemukakan oleh Muhaimin, yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Menurutnya, kurikulum harus disesuaikan dengan visi dan kebutuhan lembaga agar arah pendidikan tidak menyimpang dari tujuan utama.²¹

¹⁹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2008), 17.

²⁰ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1962), 12.

²¹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah.*, 43.

Dalam perspektif kontemporer, Michael Fullan menambahkan bahwa kurikulum bukan sekadar produk teknis, tetapi hasil dari proses refleksi dan evaluasi terhadap kebutuhan internal lembaga pendidikan serta dinamika masyarakat. Fullan menekankan pentingnya inovasi kurikulum sebagai respon terhadap perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang.²²

Sementara itu, H.A.R. Tilaar menegaskan bahwa kurikulum seharusnya tidak hanya mengikuti standar nasional yang seragam, tetapi juga perlu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal atau khas lembaga, seperti nilai pesantren dalam konteks pendidikan Islam.²³ Pandangan ini sejalan dengan konsep recontextualization dari Basil Bernstein, di mana kurikulum harus dikontekstualisasikan ulang oleh lembaga agar relevan dengan nilai, budaya, dan kebutuhan lokal.²⁴

Dalam konteks pendidikan Islam, Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat bahwa kurikulum ideal adalah kurikulum yang mampu membentuk manusia beradab, yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan akhlak yang tinggi.²⁵

Dengan demikian, kurikulum dapat dipahami sebagai seperangkat rencana pendidikan yang sistematis, kontekstual, dan bernilai strategis, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang utuh secara kognitif, afektif, dan psikomotorik.

2. Komponen-komponen Kurikulum

Terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Komponen-komponen ini saling terkait dan berfungsi sebagai satu kesatuan sistem pendidikan. Menurut para ahli, secara umum komponen kurikulum meliputi tujuan, isi atau materi, metode atau strategi, dan evaluasi.

²² Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (New York: Teachers College Press, 2007), 90.

²³ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 34.

²⁴ Basil Bernstein, *Pedagogy, Symbolic Control and Identity* (New York: Rowman & Littlefield, 2000), 111.

²⁵ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), 38.

a. Tujuan Kurikulum

Menurut Hamid Hasan, tujuan kurikulum adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan, baik secara umum, institusional, maupun instruksional.²⁶ Sementara itu, Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa tujuan kurikulum disusun secara hierarkis mulai dari tujuan nasional hingga tujuan pembelajaran.²⁷

b. Isi atau Materi Kurikulum

Menurut Hilda Taba, materi kurikulum hendaknya dipilih berdasarkan validitas, kepentingan dan kemampuan peserta didik untuk memahami dan menerapkannya.²⁸ Sementara itu, Muhaimin menyatakan bahwa isi kurikulum harus mencakup unsur kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang.²⁹

c. Metode atau Strategi Pembelajaran

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah rencana yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.³⁰ Strategi ini meliputi pendekatan, metode dan teknik yang digunakan guru dalam pembelajaran.

d. Evaluasi atau Penilaian

Nana Sudjana menyatakan bahwa evaluasi dalam kurikulum tidak hanya untuk mengetahui hasil belajar, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum.³¹ Sedangkan menurut Zainal Arifin, evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan.³²

²⁶ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 24.

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 83.

²⁸ Taba, *Curriculum Development*., 191.

²⁹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 105.

³⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), 60.

³¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 9.

³² Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 15.

3. Fungsi dan Tujuan Kurikulum

a. Fungsi Kurikulum

Secara umum, fungsi kurikulum terbagi dalam beberapa aspek. Menurut Nasution, kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kurikulum juga berperan sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai sosial dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan formal.³³

Menurut Wina Sanjaya, kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan untuk membentuk manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan tertentu.³⁴ Sementara itu, Hilda Taba menyatakan bahwa kurikulum berfungsi sebagai alat untuk membentuk perilaku dan kepribadian peserta didik secara terencana. Kurikulum tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membentuk pola pikir dan tindakan siswa dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

b. Tujuan Kurikulum

Tujuan kurikulum berkaitan erat dengan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. George Beauchamp menyatakan bahwa tujuan kurikulum merupakan hasil akhir dari proses pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.³⁶ Tujuan ini menjadi pedoman dalam pemilihan materi, metode dan evaluasi pembelajaran.

Lebih lanjut, Tyler menyebutkan bahwa penetapan tujuan pendidikan harus berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, studi tentang peserta didik,

³³ S. Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 11.

³⁴ Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran.*, 63–65.

³⁵ Taba, *Curriculum Development.*, 10.

³⁶ George Beauchamp, *Curriculum Theory* (Illinois: The Dorsey Press, 1981), 45.

serta masukan dari para ahli pendidikan dan filsafat pendidikan.³⁷ Dalam hal ini, tujuan kurikulum bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga moral dan sosial. Adapun menurut Muhaimin, tujuan kurikulum dalam pendidikan Islam tidak sekadar menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang memiliki integritas spiritual dan moral.³⁸

Menurut Wina Sanjaya, tujuan kurikulum adalah arah yang hendak dicapai melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Tujuan ini menjadi dasar dalam menyusun isi, strategi, serta sistem evaluasi pembelajaran. Tujuan kurikulum disusun secara bertingkat dan sistematis, mulai dari tujuan yang bersifat umum hingga tujuan operasional di tingkat kelas.³⁹

Di Indonesia, tujuan kurikulum secara nasional telah dirumuskan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁰

Dengan demikian, fungsi dan tujuan kurikulum menjadi dasar utama dalam perencanaan dan implementasi proses pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kurikulum lokal keagamaan seperti yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan berbasis pesantren.

B. Kurikulum Lokal Keagamaan

1. Kurikulum Lokal

Kurikulum lokal atau yang sering disebut sebagai muatan lokal merupakan bagian dari kurikulum nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, muatan lokal adalah bahan kajian dan pelajaran yang dimuat dalam kurikulum yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan

³⁷ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), 3–5.

³⁸ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 101.

³⁹ Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran.*, 30.

⁴⁰ *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.*

lokal.⁴¹ Dengan demikian, kurikulum lokal merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang menekankan pentingnya kearifan lokal.

Muhaimin menyatakan bahwa kurikulum lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang memuat kekhasan lokal untuk membekali peserta didik agar memiliki pemahaman dan keterampilan sesuai dengan karakteristik budaya, agama, sosial, dan kebutuhan daerah.⁴²

Hamalik menyatakan bahwa kurikulum lokal merupakan penyesuaian pendidikan dengan lingkungan sosial dan budaya setempat sehingga mampu menciptakan relevansi antara pembelajaran di sekolah dengan kehidupan masyarakat sekitar.⁴³

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kurikulum lokal merupakan bagian integral dari kurikulum nasional yang dirancang untuk menyesuaikan isi pembelajaran dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi daerah, sehingga mampu menciptakan relevansi antara pembelajaran di sekolah dengan kehidupan masyarakat sekitar.

2. Kurikulum Lokal Keagamaan

Kurikulum lokal keagamaan adalah bagian dari kurikulum lokal yang dikembangkan oleh satuan pendidikan untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kurikulum ini bertujuan menanamkan nilai-nilai religius, membentuk karakter Islami, serta memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik.

Menurut Syaiful Sagala, kurikulum lokal berbasis agama adalah suatu program pendidikan tambahan yang dikembangkan oleh sekolah atau madrasah dengan muatan nilai-nilai agama yang lebih dalam untuk menyesuaikan dengan visi-misi lembaga.⁴⁴

⁴¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 37 ayat (1).

⁴² Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam.*, 184.

⁴³ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 77.

⁴⁴ Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran.*, 154.

Sementara itu, Abdul Majid menyatakan bahwa kurikulum keagamaan yang dikembangkan secara lokal adalah bentuk rekonstruksi pendidikan yang menjadikan ajaran agama sebagai inti pembelajaran, namun tetap relevan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di wilayah tertentu.⁴⁵

Dengan demikian, kurikulum lokal keagamaan menjadi sarana penting untuk mewujudkan pendidikan yang kontekstual, spiritual, dan berakar pada nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat setempat.

3. Dasar Hukum

Kurikulum lokal keagamaan yang diimplementasikan oleh lembaga pendidikan, khususnya madrasah atau sekolah berbasis Islam, memiliki dasar hukum yang kuat baik secara nasional maupun dalam konteks kebijakan pendidikan daerah. Dasar hukum ini mengatur serta memberi ruang bagi pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal, termasuk dalam aspek keagamaan.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.⁴⁶ Ketentuan ini menjadi dasar legal utama bagi pengembangan kurikulum muatan lokal, termasuk kurikulum lokal keagamaan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan secara khusus dalam bentuk pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.⁴⁷ Pasal ini membuka ruang yang sangat luas bagi lembaga pendidikan keagamaan, seperti madrasah dan pesantren, untuk menyelenggarakan

⁴⁵ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 107.

⁴⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 36 Ayat (2).

⁴⁷ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.

pendidikan agama dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan praktik lokal masyarakat.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Muatan Lokal

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang isi dan media pembelajarannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya lokal.⁴⁸ Kurikulum lokal keagamaan, sebagai bagian dari muatan lokal, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang religius dan berbasis nilai-nilai keislaman.

- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) tentang Pesantren

Pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.⁴⁹ Dengan pengakuan tersebut, pesantren diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, termasuk kurikulum lokal keagamaan yang berakar dari kitab kuning, tradisi keilmuan salaf, serta kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat setempat.

- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3) tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab

Madrasah dapat mengembangkan pengayaan materi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab sesuai dengan karakteristik madrasah, kebutuhan peserta didik, dan kondisi daerah.⁵⁰ Hal ini mendukung keberadaan kurikulum lokal keagamaan sebagai bagian integral dari penguatan karakter dan pemahaman keagamaan siswa madrasah.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan prinsip kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan kebutuhan peserta didik, serta memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat.⁵¹ Dalam hal ini,

⁴⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 5 Ayat (1).

⁵⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, Bab II.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5 Ayat (1).

kurikulum lokal keagamaan dapat dikembangkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip tersebut, dengan menyesuaikan materi, pendekatan, dan nilai-nilai ajar keislaman dengan tradisi dan kondisi masyarakat tempat lembaga pendidikan tersebut berada.

4. Materi dan waktu

a. Materi

Materi kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai landasan isi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Muhaimin, materi kurikulum keagamaan harus mencakup tiga aspek penting, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang.⁵² Artinya, peserta didik tidak hanya mengetahui konsep-konsep agama secara teoritis, tetapi juga mampu menumbuhkan sikap religius dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata.

Sedangkan menurut Wina Sanjaya, materi pelajaran hendaknya memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan sosial. Materi juga harus memperhatikan tingkat perkembangan intelektual dan psikologis peserta didik, serta kelayakan untuk dipelajari dalam kurun waktu tertentu.⁵³

Teori kurikulum oleh Tyler menekankan bahwa materi kurikulum harus berisi pengalaman belajar yang bermakna dan relevan, serta secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.⁵⁴ Oleh karena itu, materi kurikulum lokal keagamaan harus mampu mengintegrasikan ajaran Islam dalam keseharian peserta didik, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosialnya.

Jean Piaget menegaskan bahwa materi yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan berpikir anak, dari yang konkret menuju abstrak. Oleh karena itu, pengenalan nilai-nilai keagamaan harus dimulai dari hal yang

⁵² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.*, 104.

⁵³ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2012), 145.

⁵⁴ Tyler, *Basic Principles.*, 1–4.

dekat dengan kehidupan mereka, seperti kegiatan keagamaan rutin di rumah dan lingkungan sekolah.⁵⁵

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa materi kurikulum, khususnya kurikulum keagamaan, merupakan inti dari proses pendidikan yang harus dirancang secara seimbang, relevan, dan kontekstual. Materi tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga harus menumbuhkan sikap religius (afektif) dan kemampuan pengamalan nilai-nilai agama (psikomotorik). Selain itu, materi perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta tahap perkembangan intelektual mereka, agar pengalaman belajar yang dihasilkan bermakna dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Waktu

Waktu pelaksanaan kurikulum lokal keagamaan tidak selalu mengikuti jam pelajaran formal seperti mata pelajaran nasional. Ia dapat diintegrasikan ke dalam struktur harian lembaga pendidikan, terutama di lembaga berbasis pesantren atau madrasah.

Menurut Permendikbud No. 79 Tahun 2014, muatan lokal dapat dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri atau diintegrasikan dalam pelajaran lain, serta dialokasikan selama dua jam pelajaran per minggu.⁵⁶ Namun dalam praktiknya, lembaga pendidikan berbasis keagamaan sering kali memperluas waktu pelaksanaan melalui pembiasaan harian dan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat spiritual.

Di lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, waktu pelaksanaan kurikulum lokal keagamaan bersifat integratif dan komprehensif, tidak hanya terbatas dalam jam pelajaran kelas. Imam Zarkasyi menekankan bahwa pendidikan di pesantren adalah proses sepanjang hari

⁵⁵ Jean Piaget, *The Psychology of Intelligence* (London: Routledge, 2001), 43–50.

⁵⁶ *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal*, Pasal 2 Ayat (1).

yang menyatu dalam kehidupan santri, termasuk melalui pola hidup dan kebiasaan ibadah sehari-hari.⁵⁷

Menurut Muhaimin, waktu pelaksanaan kurikulum keagamaan harus bersifat fleksibel, adaptif, dan berkesinambungan agar dapat merespon dinamika dan kebutuhan peserta didik di lingkungan lokal.⁵⁸ Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti pondok pesantren atau madrasah dapat mengembangkan alokasi waktu tersendiri berdasarkan pertimbangan institusi dan ketersediaan sumber daya.

Dengan demikian, waktu pelaksanaan kurikulum lokal keagamaan tidak bersifat kaku, tetapi menyatu dalam ritme kehidupan lembaga, memperkuat nilai pembiasaan, dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk menghayati serta mengamalkan ajaran Islam secara holistik.

C. Implementasi Kurikulum

1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *implementation*, yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Fullan implementasi adalah proses di mana suatu gagasan, kebijakan, atau program dijadikan kenyataan dalam praktik. Implementasi bukan sekadar menjalankan instruksi, tetapi membutuhkan pemahaman, komitmen, dan adaptasi oleh para pelaksana di lapangan.⁵⁹ Dalam konteks pendidikan, implementasi kurikulum berarti mewujudkan rencana pembelajaran yang telah disusun menjadi proses pembelajaran konkret di kelas maupun di luar kelas.

Selanjutnya Joko Susilo menyatakan bahwa implementasi adalah penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan praktis yang berdampak pada perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap individu atau kelompok. Dalam kurikulum, implementasi mencakup bagaimana guru

⁵⁷ Imam Zarkasyi, *Pola Pendidikan Pesantren Modern Gontor* (Ponorogo: Trimurti Press, 1995), 44.

⁵⁸ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi*., 156.

⁵⁹ Fullan, *The New Meaning of Educational Change*., 84.

mengajarkan materi, memilih metode, serta mengevaluasi proses dan hasil belajar.⁶⁰

Lebih lanjut, Schubert menyebut implementasi sebagai sistem rekayasa, yakni kegiatan yang terstruktur, dirancang secara sadar dan berorientasi pada tujuan tertentu dalam sistem pendidikan.⁶¹ Artinya, implementasi bukanlah kegiatan spontan atau rutin semata, tetapi bagian dari strategi pendidikan yang disusun secara sistemik dan evaluatif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses penerapan gagasan, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata yang terencana dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, implementasi berarti mewujudkan kurikulum atau rencana pembelajaran menjadi kegiatan belajar yang konkret melalui peran aktif guru, strategi pembelajaran, serta evaluasi yang sistematis. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis, melainkan proses yang membutuhkan pemahaman, komitmen, dan adaptasi agar menghasilkan perubahan yang bermakna dalam pembelajaran.

2. Pengertian Implementasi Kurikulum

Menurut pendapat Wina Sanjaya, implementasi kurikulum adalah proses pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kurikulum, agar tujuan pendidikan yang telah ditentukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁶² Ia menekankan bahwa implementasi bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi, strategi, serta tujuan kurikulum.

Sementara itu, Syaiful Sagala menjelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai komponen pendidikan seperti guru, peserta didik, fasilitas, serta kondisi lingkungan belajar. Dalam pandangannya, keberhasilan implementasi

⁶⁰ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam: Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 189–191.

⁶¹ William H. Schubert, *Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility* (New York: Macmillan, 1986), 89.

⁶² Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*., 112.

kurikulum sangat tergantung pada kesiapan dan pemahaman para pelaku pendidikan.⁶³

Miller dan Seller menjelaskan terkait makna implementasi kurikulum yaitu mengaplikasikan suatu rencana, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.⁶⁴

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses penerapan rencana pendidikan ke dalam praktik pembelajaran nyata agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Proses ini tidak hanya menuntut pelaksanaan prosedural, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap isi, strategi, dan tujuan kurikulum. Selain itu, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru, peserta didik, sarana pendukung, serta kondisi lingkungan belajar yang mendukung terjadinya perubahan positif dalam proses pendidikan.

3. Tahapan Implementasi Kurikulum

Menurut Mulyasa, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum adalah perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum. Pendapat tersebut sama halnya dengan yang dikatakan Oemar Hamalik, terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan kurikulum yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.⁶⁵

a. Tahap perencanaan

Tahap ini merupakan langkah awal dari implementasi, di mana guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Rencana ini meliputi penetapan tujuan, pemilihan materi, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.⁶⁶

⁶³ Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*., 92.

⁶⁴ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 237.

⁶⁵ Agus Salim Salibi, "Efektifitas Implementasi Kurikulum Sekolah", *Jurnal Achievement*, Vol. 01, No. 01 (2020), 6.

⁶⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 145.

Menurut E. Mulyasa pada tahap ini Guru harus mampu menerjemahkan kurikulum ke dalam perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Perencanaan ini harus mempertimbangkan potensi lokal, karakteristik siswa, dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.⁶⁷

Pada lembaga pendidikan di Indonesia, perencanaan strategis kurikulum biasanya dikoordinasikan oleh pengelola yayasan, kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, guru dan komite sekolah. Dasar dari perumusan standar kompetensi adalah tujuan sekolah yang termuat dalam visi misi sekolah, filsafat yang diikuti sekolah, peraturan pemerintah, harapan masyarakat, dan tuntutan kehidupan.⁶⁸ Dengan demikian, kurikulum yang terbentuk diharap mampu mewujudkan kemampuan yang diharapkan pada peserta didik.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan adalah penerapan dari rencana pembelajaran ke dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Guru memainkan peran sentral sebagai fasilitator, motivator, dan pengelola kelas. Interaksi antara guru dan peserta didik harus berlangsung aktif, kreatif, dan kondusif agar tujuan pembelajaran tercapai.⁶⁹

Menurut E. Mulyasa pada tahap ini guru harus mampu menerapkan pendekatan, metode, dan teknik yang bervariasi serta melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kreativitas dan kemampuan adaptasi guru menjadi kunci keberhasilan dalam tahap ini.⁷⁰

c. Tahap evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum berhasil diimplementasikan. Evaluasi menurut Hamalik tidak hanya berorientasi pada

⁶⁷ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 81.

⁶⁸ Arfandi Munif Shaleh, "Tahapan-tahapan dalam Manajemen Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2018), 64.

⁶⁹ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 146.

⁷⁰ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, 83.

hasil belajar peserta didik, tetapi juga proses pembelajaran itu sendiri, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depan.⁷¹

E. Mulyasa menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan refleksi terhadap metode dan strategi yang telah digunakan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.⁷²

Pada pasal 57 ayat 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.⁷³ Dengan demikian memberikan makna bahwa evaluasi kurikulum dilakukan secara menyeluruh pada komponen pendidikan.

4. Faktor-faktor Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada rancangan kurikulum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan dalam pelaksanaan di lapangan. Menurut para ahli, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi implementasi kurikulum di lingkungan pendidikan.

a. Faktor Guru

Guru memegang peran sentral dalam implementasi kurikulum. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, guru adalah pelaksana utama kurikulum di kelas, sehingga kompetensi, pemahaman dan kesiapan guru terhadap isi dan tujuan kurikulum sangat menentukan keberhasilan implementasi.⁷⁴ E. Mulyasa menegaskan bahwa implementasi kurikulum akan berjalan efektif apabila guru memahami tujuan, isi, dan strategi pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Guru juga dituntut untuk

⁷¹ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum.*, 147.

⁷² Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013.*, 85.

⁷³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Armas Duta Jaya, 2014).

⁷⁴ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum.*, 126.

memiliki kemampuan pedagogik dan profesional dalam menerjemahkan dokumen kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang bermakna.⁷⁵

b. Faktor Peserta Didik

Karakteristik peserta didik juga menjadi variabel penting dalam implementasi kurikulum. Siswa memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan intelektual yang berbeda-beda. Menurut Joyce dan Weil model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa agar tercapai hasil belajar yang optimal.⁷⁶

Oleh karena itu, guru harus mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi siswa agar pembelajaran tidak hanya efektif, tetapi juga inklusif. Menurut S. Nasution, keberhasilan kurikulum bergantung pada sejauh mana materi dan metode pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.⁷⁷

c. Faktor Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Ketersediaan sumber daya seperti fasilitas belajar, media pembelajaran, buku teks dan teknologi pendidikan sangat berpengaruh terhadap implementasi kurikulum. E. Mulyasa menyatakan bahwa kelengkapan dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan dapat memperlancar proses pembelajaran sesuai dengan yang dirancang dalam kurikulum.⁷⁸

Ketiadaan sarana yang memadai seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana menjadi prioritas dalam mendukung pelaksanaan kurikulum secara efektif.

d. Faktor Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengarahkan pelaksanaan kurikulum. Glickman menyatakan bahwa kepala sekolah yang visioner, partisipatif, dan

⁷⁵ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013.*, 76.

⁷⁶ Bruce Joyce dan Marsha Weil, *Models of Teaching* (Boston: Allyn and Bacon, 2000), 23.

⁷⁷ Nasution, *Berbagai Pendekatan.*, 90.

⁷⁸ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013.*, 148.

mendukung pengembangan profesional guru akan mendorong implementasi kurikulum yang lebih optimal. Kepemimpinan yang efektif juga mampu menciptakan budaya sekolah yang kondusif bagi pembelajaran.⁷⁹ Menurut Sergiovanni Kepala sekolah yang memiliki visi dan strategi jelas, serta mampu memotivasi dan membina guru, sangat membantu dalam implementasi kurikulum.⁸⁰

e. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya tempat sekolah berada turut memengaruhi bagaimana kurikulum diimplementasikan. Menurut Supriatna lingkungan masyarakat yang memiliki nilai-nilai lokal yang kuat dapat menjadi pendukung atau bahkan penghambat dalam pelaksanaan kurikulum, tergantung pada sejauh mana keterkaitan antara isi kurikulum dengan konteks lokal.⁸¹

Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum perlu adanya penyesuaian dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hilda Taba yang menyebutkan bahwa kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat sebagai konteks implementasi.⁸²

f. Faktor Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Implementasi kurikulum tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan yang mendukung, seperti pelatihan guru, pengadaan buku teks, dan evaluasi pendidikan yang adil dan konsisten, akan memperkuat pelaksanaan kurikulum. Menurut Anderson keberhasilan implementasi kurikulum sangat

⁷⁹ Carl D. Glickman, *Leadership for Learning* (Alexandria, VA: ASCD, 2001), 45.

⁸⁰ Thomas J. Sergiovanni, *The Principalsip: A Reflective Practice Perspective* (Boston: Allyn & Bacon, 1995), 98.

⁸¹ Nana Supriatna, *Pendidikan Multikultural: Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: UPI Press, 2007), 57.

⁸² Taba, *Curriculum Development.*, 216.

dipengaruhi oleh koherensi antara kebijakan pendidikan nasional dan pelaksanaan di tingkat sekolah.⁸³

D. Pemahaman Keagamaan

1. Pengertian Pemahaman Keagamaan

Menurut Zakiah Daradjat, pemahaman keagamaan adalah proses pembentukan sikap dan tingkah laku seseorang yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, yang terbentuk melalui pendidikan agama yang efektif dan berkesinambungan.⁸⁴ Pemahaman dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang ajaran agama, tetapi juga bagaimana individu menginternalisasi dan merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Jalaluddin, pemahaman keagamaan adalah hasil dari proses penalaran dan pengalaman batin seseorang terhadap ajaran agama yang dipelajarinya, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk keyakinan, sikap, dan perilaku keagamaan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁵

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pemahaman terhadap agama tidak boleh hanya berhenti pada tataran literal teks, melainkan harus dilanjutkan pada makna kontekstual dan substansial dari pesan-pesan agama.⁸⁶ Oleh karena itu, seseorang yang benar-benar memahami ajaran agama adalah mereka yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual ke dalam tindakan sosial yang etis dan bermakna.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman keagamaan merupakan hasil dari proses pendidikan, penalaran, dan pengalaman batin seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek pengetahuan tentang ajaran agama, tetapi juga mencakup penghayatan dan penerapan nilai-nilai agama dalam sikap, perilaku, serta kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman keagamaan

⁸³ Lorin W. Anderson, *Curriculum Alignment: A Facilitator's Guide* (Thousand Oaks: Corwin Press, 2002), 66.

⁸⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 45.

⁸⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 87.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 24.

yang sejati menuntut keseimbangan antara pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama secara kontekstual dan bermakna.

2. Indikator Pemahaman Keagamaan

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman keagamaan seseorang, diperlukan indikator yang mencakup ranah kognitif (berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir), afektif (berkaitan dengan sikap dan nilai) dan psikomotorik (berkaitan dengan keterampilan dan tindakan nyata).⁸⁷ sebagaimana dikembangkan dalam taksonomi tujuan pendidikan oleh Benjamin Bloom dan diperkuat oleh para ahli pendidikan Islam.

a. Indikator Ranah Kognitif

Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan menguasai materi keagamaan. Menurut Bloom, kemampuan kognitif ini meliputi enam tingkatan, yaitu: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).⁸⁸ Dalam konteks pendidikan agama, indikator pemahaman keagamaan pada ranah kognitif dapat meliputi:

- 1) Menghafal dan mengenal istilah keagamaan seperti rukun iman dan rukun Islam
- 2) Memahami makna ibadah, ayat, hadits, dan hukum syariah
- 3) Menjelaskan konsep-konsep keimanan, akhlak, dan ibadah
- 4) Menganalisis dan membandingkan ajaran agama dalam berbagai konteks kehidupan
- 5) Mampu membedakan antara yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram
- 6) Memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena keagamaan dalam kehidupan sosial.⁸⁹

⁸⁷ Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain* (New York: Longmans, Green, 1956), 7–10.

⁸⁸ Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives.*, 12–16.

⁸⁹ Muhaimin, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 98.

Muhaimin menyebutkan bahwa indikator kognitif pemahaman keagamaan mencakup pengetahuan tentang dasar-dasar agama Islam seperti tauhid, syariah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam.⁹⁰

b. Indikator Ranah Afektif

Ranah afektif menyangkut perasaan, nilai, dan sikap seseorang terhadap ajaran agama. Ranah ini lebih sulit diukur secara langsung, tetapi bisa diamati melalui ekspresi sikap dan konsistensi perilaku. Krathwohl mengelompokkan ranah afektif dalam lima tingkatan, yaitu penerimaan (*receiving*), tanggapan (*responding*), penghargaan (*valuing*), pengorganisasian (*organization*), dan pembentukan karakter (*characterization*).⁹¹ Dalam hal ini, seseorang dikatakan memiliki pemahaman keagamaan yang baik jika mampu menginternalisasi nilai-nilai agama ke dalam sikap hidupnya. Indikator afektif dalam pemahaman keagamaan antara lain:

- 1) Menunjukkan ketertarikan terhadap ajaran agama
- 2) Menunjukkan sikap taat dalam menjalankan perintah agama
- 3) Menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial
- 4) Menghargai nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan toleransi
- 5) Menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup.
- 6) Menunjukkan sikap takzim terhadap kitab suci, guru agama, dan tempat ibadah.

Menurut Ahmad Tafsir, pemahaman keagamaan yang sejati tercermin dalam sikap moral dan spiritual seseorang, seperti empati, toleransi, keadilan, dan kesalehan sosial.⁹²

c. Indikator Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik merujuk pada keterampilan jasmani atau tindakan nyata dalam menjalankan ajaran agama. Simpson mengkategorikan

⁹⁰ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 134.

⁹¹ David R. Krathwohl et al., *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II: Affective Domain* (New York: David McKay Company, 1964), 7–24.

⁹² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 112.

ranah ini ke dalam tujuh level: persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon kompleks, adaptasi, dan orisinalitas.⁹³ Dalam konteks pemahaman keagamaan, indikator ranah psikomotorik meliputi:

- 1) Melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, dan zakat dengan benar
- 2) Membiasakan diri membaca Al-Qur'an dan doa-doa harian
- 3) Terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan seperti bakti sosial, penggalangan dana kemanusiaan, dan kegiatan dakwah
- 4) Melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan tercela sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

Muhaimin menyatakan bahwa pengamalan keagamaan yang terwujud dalam tindakan nyata adalah bukti dari pemahaman yang menyeluruh terhadap ajaran agama.⁹⁴

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Keagamaan

Pemahaman keagamaan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan internalisasi ajaran agama yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam pandangan para ahli pendidikan dan psikologi, faktor-faktor tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling memengaruhi dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupannya.⁹⁵

a. Faktor Internal Pemahaman Keagamaan

Faktor internal merupakan aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu, mencakup kondisi biologis, psikologis, dan intelektual yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami ajaran agama.

1) Kecerdasan dan Kapasitas Kognitif

Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh tingkat inteligensi individu. Semakin tinggi tingkat kecerdasan

⁹³ Elizabeth J. Simpson, *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain* (Washington, D.C.: Gryphon House, 1972), 8.

⁹⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam.*, 135.

⁹⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 127.

seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam memahami konsep-konsep abstrak, termasuk ajaran agama.⁹⁶

2) Motivasi Beragama

Slameto menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan internal yang mempengaruhi semangat belajar seseorang, termasuk dalam hal pemahaman keagamaan.⁹⁷ Seseorang yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar agama akan lebih giat membaca, mendalami, dan menghayati ajaran agamanya.

3) Kematangan Emosional dan Spiritualitas

Zakiah Daradjat menegaskan bahwa kematangan emosional berpengaruh terhadap kestabilan dalam menerima ajaran agama. Individu yang stabil secara emosi cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang lebih utuh karena mampu mengaitkan ajaran agama dengan pengalaman hidupnya.⁹⁸

4) Pengalaman Keagamaan Pribadi

Menurut Jalaluddin, pengalaman keagamaan seperti keterlibatan dalam kegiatan ibadah, pengalaman spiritual pribadi, dan perenungan mendalam akan ajaran agama merupakan sumber internal yang memperkaya pemahaman seseorang terhadap agama.⁹⁹

b. Faktor Eksternal Pemahaman Keagamaan

Faktor eksternal adalah pengaruh dari luar diri individu yang membentuk cara pandang, sikap dan pemahaman terhadap agama. Faktor ini mencakup lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, dan media.

1) Lingkungan Keluarga

Muhaimin menegaskan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak mengenal agama. Pola asuh, teladan orang tua, serta

⁹⁶ Piaget, *The Psychology of Intelligence*., 43–50.

⁹⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 102.

⁹⁸ Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*., 81.

⁹⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 91.

kebiasaan religius dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pemahaman keagamaan.¹⁰⁰

2) Lembaga Pendidikan

Muhaimin menyebut bahwa pendidikan agama yang efektif ditentukan oleh guru, kurikulum, metode pembelajaran, serta suasana belajar yang kondusif.¹⁰¹ Guru agama yang inspiratif dan kompeten dapat menumbuhkan pemahaman mendalam serta sikap religius pada peserta didik.

3) Teman Sebaya dan Lingkungan Sosial

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa lingkungan masyarakat yang religius dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai agama dan membentuk perilaku keagamaan yang positif.¹⁰² Lingkungan yang kondusif dan religius akan mendukung internalisasi nilai-nilai agama. Sebaliknya, lingkungan negatif dapat menjauhkan seseorang dari nilai keagamaan.

4) Media Massa dan Teknologi Informasi

Menurut Nur Syam, media memiliki kekuatan dalam menyebarkan informasi keagamaan. Namun, media juga dapat menjadi faktor yang membingungkan jika tidak disertai dengan literasi agama yang memadai. Oleh karena itu, penggunaan media harus diarahkan secara bijak dalam rangka memperkuat pemahaman keagamaan.¹⁰³

4. Upaya Meningkatkan Pemahaman Keagamaan

Pemahaman keagamaan yang baik merupakan tujuan utama dalam pendidikan agama. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal, maupun masyarakat.

¹⁰⁰ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 73.

¹⁰¹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam.*, 152.

¹⁰² Sanjaya, *Strategi Pembelajaran.*, 89.

¹⁰³ Nur Syam, *Islam dan Media: Menyikapi Wacana Keagamaan di Era Digital* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 56.

a. Optimalisasi Kualitas Pendidikan Agama

Menurut Muhaimin, pendidikan agama harus dirancang secara integratif, tidak hanya berorientasi pada hafalan dan kognisi, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku.¹⁰⁴

b. Optimalisasi Peran Keluarga

Zakiah Daradjat menyatakan bahwa anak lebih mudah menangkap makna ajaran agama melalui contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan melalui ceramah semata.¹⁰⁵ Ungkapan di atas menegaskan bahwa kebiasaan dan sikap orang tua terhadap agama sangat mempengaruhi pemahaman anak tentang nilai-nilai keagamaan.

c. Pemanfaatan Media dan Teknologi Informasi

Menurut Ahmad Tafsir, media dapat berperan sebagai alat bantu dalam proses internalisasi ajaran agama bila digunakan secara edukatif.¹⁰⁶ Media massa dan teknologi digital dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, asalkan dimanfaatkan secara positif.

d. Penguatan Lingkungan Sosial dan Kultural

Menurut Abuddin Nata, masyarakat yang religius dapat menciptakan budaya yang mendukung penguatan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan keagamaan bersama.¹⁰⁷ Lingkungan sosial yang kondusif akan sangat mendukung proses pemahaman keagamaan.

e. Pembinaan Keagamaan Berkelanjutan

Quraish Shihab menyatakan bahwa pemahaman agama yang benar harus dibangun dengan landasan ilmu yang kokoh, pengalaman batin, serta pembiasaan amal saleh yang berkelanjutan.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam.*, 153.

¹⁰⁵ Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam.*, 93.

¹⁰⁶ Tafsir, *Ilmu Pendidikan.*, 142.

¹⁰⁷ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Indonesia: Perkembangan dan Tantangannya* (Jakarta: Grasindo, 2003), 97.

¹⁰⁸ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.*, 34.